

**ANALISIS BANTUAN MODAL DAN KREDIT  
BAGI KELOMPOK PELAKU USAHA MIKRO  
OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM**

**KOTA SEMARANG**

**(Studi Kasus: KPUM di Kelurahan Pekunden, Kecamatan  
Semarang Tengah)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**RIFDA ZAHRA AFIFAH**  
**NIM C2B007057**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rifda Zahra Afifah  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007057  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS BANTUAN MODAL DAN KREDIT BAGI KELOMPOK PELAKU USAHA MIKRO OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SEMARANG (Studi Kasus: KPUM di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah)**

Dosen Pembimbing : Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si

Semarang, 23 Mei 2012

Dosen Pembimbing,



(Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si)  
NIP 196905101997021001



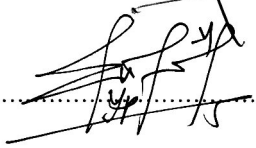
## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rifda Zahra Afifah  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B007057  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS BANTUAN MODAL DAN KREDIT BAGI KELOMPOK PELAKU USAHA MIKRO OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA SEMARANG (Studi Kasus: KPUM di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 Juni 2012**

Tim Penguji

1. Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si (  )  
2. Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc. (  )  
3. Evi Yulia P., S.E., M.Si (  )

Semarang, Juni 2012  
Mengetahui,  
Pembantu Dekan I



Anis Chariri, S.E., M.Com, Ph.D,Akt.  
NIP 196708091992031001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rifda Zahra Afifah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Bantuan Modal dan Kredit bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (Studi Kasus: KPUM di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 23 Mei 2012  
Yang membuat pernyataan,



( Rifda Zahra Afifah )  
NIM C2B007057

## **MOTTO**

Time is Life  
Hidup adalah Ibadah,,

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar  
mereka beribadah kepada-Ku”  
(Adz-Dzariyat:56)

## **PERSEMBAHAN**

Kepada Allah SWT,  
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Kedua orangtua, adik-adik, keluarga besar, sahabat, teman,  
dan para pembaca semuanya

## **ABSTRACT**

*Micro enterprises are the largest group (96%) in Indonesia with the characteristics of low-income and engaged in informal sector. One obstacle in the development of micro enterprises are limited capital and limited accesess to capital source.*

*This reaserch is a case study of a group loans for micro enterprises by Department of Cooperatives and MSEs in Semarang in District of Pekunden, Semarang City. The purpose of this study is to analyze the differences in capital, sales turnover, and profit of the micro enterprises which is obtain loan.*

*Data analysis in this research using descriptive analysis, validity test, realibility test, and Wilcoxon sign rank test. Samples are analyzed as many as 48 respondents who received loans from Department of Cooperatives and MSEs.*

*The analysis showed that the loan from Department of Cooperatives and MSEs can help the micro enterprises in District of Pekunden to increase capital, sales turnover, and profit that is refer to the variable differences of capital, sales turnover, and profit after seeing before and after obtained the loan. This implies that the lending program of the government through the provision of a loan can help the micro enterprises development.*

*Key Words : micro enterprises, loans of Department of Cooperatives and MSEs Semarang City, capital, sales turnover, profit*

## **ABSTRAKSI**

Usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah dan bergerak di sektor informal. Salah satu kendala dalam perkembangan usaha mikro adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan.

Penelitian ini merupakan studi kasus pemberian kredit bagi kelompok pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang di Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan modal usaha, omzet penjualan, dan laba dari usaha mikro yang memperoleh kredit.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji pangkat tanda Wilcoxon. Sampel yang dianalisis sebanyak 48 responden yang mendapat kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM dapat membantu meningkatkan modal usaha, omzet penjualan, dan laba para pelaku usaha mikro di Kelurahan Pekunden yang dilihat dari perbedaan variabel modal usaha, omzet penjualan, dan laba antara sebelum dan setelah mendapat kredit. Hal tersebut memberikan implikasi bahwa program perkreditan dari pemerintah melalui pemberian pinjaman modal dapat membantu pengembangan usaha mikro.

**Kata Kunci** : Usaha Mikro, Kredit Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, Modal Usaha, Omzet Penjualan, Laba

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Bantuan Modal dan Kredit bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Semarang (Studi Kasus: KPUM di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah)” ini dapat terselesaikan dengan baik walaupun dalam uraian dan pembahasannya masih sederhana. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada Muhammad SAW, suri tauladan manusia, dan kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu teguh di jalan-Nya.

Kami menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak baik moril maupun materil, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Karena itu sudah sepatutnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, rezeki, dan kemudahan yang diberikan-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran yang baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.




4. Ibu Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi, dukungan, maupun saran selama menjalani studi di Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang beserta stafnya, dan kepada Bapak Issamsudin yang telah memberikan bantuan dan informasi bagi kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Orangtua tercinta atas doa, kesabaran, kasih sayang, dukungan dan motivasi yang tiada habisnya untuk mengharapkan yang terbaik bagi anaknya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian. Love you all.
8. Adik-adikku, saudara dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Mizan FEB Undip, KSEI, PD, BPMAI, dan ZIS. Senang bisa menjadi bagian dari kalian. Semoga ukhuwah dan silaturrahim tetap terjalin.
10. Buat Nisa, Viki, Dini, Tiwi, Dina, Putri, dan Lita. Sahabat-sahabatku tersayang yang lucu dan unik. Keep smile:)
11. Teman-teman IESP 2007 atas kebersamaannya selama belajar di jurusan IESP. Terima kasih semuanya.
12. Bu Rita dan teman-teman satu lingkaran atas doa dan dukungannya.
13. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomika dan Bisnis atas bantuan yang diberikan.

Kami menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, kami ucapkan terima kasih. Semoga budi baik dan bantuannya di balas oleh Allah SWT dengan pahala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 23 Mei 2012

Penulis



Rifda Zahra Afifah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Usaha Mikro .....	10
2.1.1.1 Definisi Usaha Mikro .....	10
2.1.1.2 Tujuan Usaha Mikro .....	12
2.1.1.3 Peranan Usaha Mikro .....	13
2.1.1.4 Karakteristik Usaha Mikro .....	14
2.1.1.5 Tantangan dan Permasalahan Usaha Mikro .....	15
2.1.1.6 Kelompok Pelaku Usaha Mikro (KPUM) .....	21
2.1.2 Modal .....	23
2.1.2.1 Definisi Modal .....	25
2.1.2.2 Konsep Modal .....	27
2.1.3 Kredit .....	29
2.1.3.1 Definisi Kredit .....	29
2.1.3.2 Fungsi dan Manfaat Kredit .....	29
2.1.3.3 Unsur-unsur Kredit .....	30
2.1.3.4 Jenis-jenis Kredit .....	31
2.2 Penelitian Terdahulu .....	33
2.3 Kerangka Pemikiran .....	34

2.4 Hipotesis .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1 Variabel Operasional dan Definisi Operasional Variabel .....	36
3.1.1 Variabel Penelitian .....	36
3.1.2 Definisi Operasional Variabel .....	36
3.2 Populasi dan Sampel .....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	38
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	38
3.5 Metode Analisis .....	39
3.5.1 Uji Validitas .....	39
3.5.2 Uji Reliabilitas .....	40
3.5.3 Uji Pangkat Tanda Wilcoxon .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	42
4.1.1 Kondisi Geografis .....	42
4.1.2 Kondisi Demografis .....	44
4.2 Deskripsi Bantuan Modal dan Kredit dari Dinas KUMKM .....	45
4.3 Profil Responden .....	46
4.3.1 Umur Responden .....	46
4.3.2 Jenis Kelamin .....	47
4.3.3 Status Marital .....	47
4.3.4 Pendidikan .....	48
4.3.5 Lama Usaha .....	49
4.3.6 Jenis Usaha .....	50
4.3.7 Jenis Barang Hibah yang Diterima .....	50
4.3.8 Analisis Deskriptif Hasil Kuesioner .....	51
4.3.8.1 Modal Usaha .....	51
4.3.8.2 Omzet Penjualan .....	52
4.3.8.3 Laba .....	53
4.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	55
4.4.1 Uji Validitas .....	55
4.4.2 Uji Reliabilitas .....	57
4.5 Analisis Data .....	58
4.5.1 Analisis Uji Pangkat Tanda Wilcoxon .....	58
4.5.2 Analisis Deskriptif Perbedaan Variabel Penelitian .....	61
4.5.3 Analisis Uji Pangkat Tanda Wilcoxon secara Parsial terhadap KPUM .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69

DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN .....	75

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Tahun 2007-2009.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1	Kelompok Pelaku Usaha Mikro (KPUM) di Kelurahan Pekunden Tahun 2011 .....	37
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2007-2009 .....	44
Tabel 4.2	Responden Menurut Kelompok Umur .....	46
Tabel 4.3	Responden Menurut Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.4	Responden Menurut Status Marital.....	48
Tabel 4.5	Responden Menurut Pendidikan .....	49
Tabel 4.6	Responden Menurut Lama Usaha .....	49
Tabel 4.7	Responden Menurut Jenis Usaha .....	50
Tabel 4.8	Jenis Barang Hibah yang Diterima.....	51
Tabel 4.9	Hasil Kuesioner Variabel Modal Usaha .....	51
Tabel 4.10	Hasil Kuesioner Variabel Omzet Penjualan .....	52
Tabel 4.11	Hasil Kuesioner Variabel Laba .....	54
Tabel 4.12	Pengujian Validitas Variabel Modal Usaha.....	56
Tabel 4.13	Pengujian Validitas Variabel Omzet Penjualan .....	56
Tabel 4.14	Pengujian Validitas Variabel Laba.....	57
Tabel 4.15	Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian .....	58
Tabel 4.16	Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Modal Usaha Sebelum dan Setelah Memperoleh Kredit Dinas KUMKM Kota Semarang .....	59
Tabel 4.17	Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Omzet Penjualan Sebelum dan Setelah Memperoleh Kredit Dinas KUMKM Kota Semarang .....	60
Tabel 4.18	Hasil Uji Hipotesis Perbedaan Laba Sebelum dan Setelah Memperoleh Kredit Dinas KUMKM Kota Semarang .....	61
Tabel 4.19	Perbedaan Variabel Penelitian antara Sebelum dan Setelah Memperoleh Kredit Dinas KUMKM Kota Semarang.....	62
Tabel 4.20	Hasil Uji Hipotesis Modal Usaha per KPUM Sebelum dan Setelah Memperoleh Kredit Dinas KUMKM Kota Semarang.....	64
Tabel 4.21	Hasil Uji Hipotesis Omzet Penjualan per KPUM Sebelum dan Setelah Memperoleh Kredit Dinas KUMKM Kota Semarang .....	65
Tabel 4.22	Hasil Uji Hipotesis Laba per KPUM Sebelum dan Setelah Memperoleh Kredit Dinas KUMKM Kota Semarang .....	66

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	34
Gambar 4.1 Peta Ruang Struktur Kota Semarang .....	43
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Semarang Tengah .....	43
Gambar 4.3 Persentase Hasil Kuesioner Variabel Modal Usaha .....	52
Gambar 4.4 Persentase Hasil Kuesioner Variabel Omzet Penjualan.....	53
Gambar 4.5 Persentase Hasil Kuesioner Variabel Laba .....	54
Gambar 4.6 Perbedaan Variabel Penelitian antara Sebelum dan Setelah Memperoleh Kredit Dinas KUMKM Kota Semarang .....	62
Gambar 4.7 Persentase Kenaikan Variabel Penelitian Setelah Memperoleh Kredit Dinas KUMKM Kota Semarang .....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejarah telah menunjukkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia tetap eksis dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, bahkan menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja (Ravik dan Heru, 2005).

Sejak saat itu peranan UMKM dalam menopang perekonomian nasional maupun regional dari tahun ke tahun baik eksistensi, ketangguhan maupun kontribusinya terus meningkat. Keberhasilan UMKM ini dikarenakan, pertama, UMKM tidak memiliki utang luar negeri dan tidak banyak utang ke perbankan. Kedua, sektor-sektor kegiatan UMKM, seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya tidak bergantung sumber bahan baku dari luar negeri. UMKM menggunakan bahan baku lokal. Ketiga, walaupun belum semuanya, UMKM berorientasi ekspor. Dapat dikatakan UMKM merupakan soko guru perekonomian nasional. Sumbangan UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 54%-57%, dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2011).

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99%



dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 52,76 juta unit (BPS, 2009). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 tersebut juga menunjukkan bahwa UMKM terbukti berkontribusi sebesar 56,92% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp1.213,25 Triliun. Selain itu, UMKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja (menyerap 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja) dan memiliki jumlah yang besar dari total unit usaha di Indonesia serta kontribusi yang cukup besar terhadap investasi di Indonesia yaitu sebesar Rp222,74 Triliun atau 51,80% dari total investasi pada tahun 2008 (Bank Indonesia, 2011).

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Iman dan Adi, 2009)

Mengingat besarnya peran UMKM tersebut, maka pemerintah melalui instansi terkait terutama Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan berbagai program bantuan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong usaha kecil dan menengah cukup serius. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menegaskan bahwa, usaha ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya (Haryadi, 2010).

Usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebagian besar kasus, kelompok usaha mikro masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: gizi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang bersaing. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategi yang tersendiri, melalui pengembangan pranata kelembagaan usaha mikro, pengembangan lembaga keuangan mikro dan mendorong pengembangan industri pedesaan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2005).

Salah satu kendala dalam perkembangan usaha mikro adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Mengutip laporan BPS, Dibyو Prabowo (2004 dalam Noer, 2005) menegaskan bahwa 35,10% UKM menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan baku 15,4%. Dalam kondisi yang demikian kelompok ini akan sangat sulit keluar dari permasalahan yang biasanya sudah berjalan lama tersebut, kecuali bila ada intervensi dari pihak lain.

Kim (1984 dalam Saudin, 2008) lebih lanjut mengatakan bahwa intervensi untuk memutus rantai permasalahan ini dapat saja dilakukan jika ada komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat melalui pemberian pinjaman modal. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran pemerintah untuk melaksanakan perkuatan di bidang permodalan. Belum terlihatnya pengaruh nyata dari intervensi

pemerintah tersebut diduga dikarenakan sangat kecilnya dana-dana pemerintah yang disalurkan dibandingkan dengan besarnya jumlah UMKM yang membutuhkannya.

Kota Semarang mempunyai potensi industri yang cukup tinggi, sektor industri mempunyai kontribusi terbesar kedua setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam perolehan produk domestik regional bruto (PDRB). Pada tahun 2009 kontribusi masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,86 %, industri pengolahan sebesar 24,52%, dan sektor bangunan sebesar 19,27%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan ([www.semarangkota.go.id](http://www.semarangkota.go.id)).

*Linkage* dari sektor tersebut ternyata berpengaruh cukup besar bagi pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil di Semarang (Fitra, 2011).

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode 2007-2009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut ([www.semarangkota.go.id](http://www.semarangkota.go.id)):

**Tabel 1.1**  
**Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan**  
**Menengah Kota Semarang Tahun 2007-2009**

No.	Indikator	Tahun		
		2007	2008	2009
1.	Persentase koperasi aktif	65,30%	75,05%	75%
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	140	231	346
3.	Usaha Mikro dan Kecil	8.112	9.162	10.176

Sumber: Data Olahan Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang (dalam [www.semarangkota.go.id](http://www.semarangkota.go.id))

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Semarang tiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang produktif, karena adanya pertumbuhan dan iklim usaha mikro dan kecil yang membaik dan kondusif. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis ekonomi, usaha kecil dan mikro lebih resisten dibanding perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Hal inilah yang akan terus dijaga dan ditingkatkan melalui rencana fasilitasi permodalan yang mampu mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat yang tidak hanya aktif namun juga benar sehat sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi terutama dari pengembangan usaha mikro dan kecil ([www.semarangkota.go.id](http://www.semarangkota.go.id)).

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang dalam Pasal 4, salah satu fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian

bimbingan di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta fasilitasi pembiayaan di lingkungan Kota Semarang.

Kecamatan Semarang Tengah merupakan pusat kota yang juga menjadi pusat pemerintahan Kota Semarang. Di kecamatan ini terdapat daerah dengan penduduk yang tergolong masyarakat miskin di antaranya yaitu di Kelurahan Pekunden. Daerah tersebut merupakan segitiga emas karena dikelilingi oleh pusat pemerintahan, bisnis, pertokoan ataupun perbelanjaan. Dinas KUMKM menilai wilayah Pekunden perlu adanya pembinaan, perbaikan dari segi sosial-ekonomi serta peningkatan kesehatan di daerah tersebut. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, sehingga diperlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Dalam penanggulangannya harus ada sinergitas antara pemerintah kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro ([www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)).

Salah satu program dari Dinas Koperasi dan UMKM adalah pemberian bantuan modal dan kredit kepada kelompok pelaku usaha mikro (KPUM) yang mendapat pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Kelompok pelaku usaha mikro ini terdapat di beberapa kelurahan di kecamatan yang ada di Kota Semarang yang terdiri dari beberapa kelompok usaha per kelurahan. Setiap kelompok mempunyai anggota yang merupakan pelaku usaha mikro.

Dalam penelitian ini, obyek penelitian adalah kelompok pelaku usaha mikro di Kecamatan Semarang Tengah yaitu kelompok pelaku usaha mikro di

Kelurahan Pekunden yang mendapat bantuan modal dan kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Dengan melihat penjelasan di atas, dengan permasalahan yang dihadapi usaha mikro dalam permodalan serta pengaruh kebijakan maupun peran pemerintah dalam membantu pengembangan usaha mikro, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perkembangan usaha mikro dalam modal usaha, omzet penjualan, dan laba setelah mendapat kredit dari pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Salah satu program pemerintah daerah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yaitu memberikan bantuan modal dan kredit kepada usaha mikro antara lain di Kelurahan Pekunden. Dinas KUMKM menilai wilayah Pekunden perlu adanya pembinaan dan perbaikan dari segi sosial-ekonomi mengingat daerah tersebut berada di wilayah pusat kota namun masih terdapat masyarakat miskin sehingga Dinas KUMKM membuat program pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok pelaku usaha mikro.

Salah satu hambatan dalam perkembangan usaha mikro adalah keterbatasan dana yang dimiliki serta sulitnya mendapatkan sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi modal dalam mendukung produksi usaha mikro. Mengingat hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Dinas KUMKM Kota Semarang yaitu dengan pemberian kredit bagi usaha mikro untuk pengembangan usahanya. Dalam penelitian ini, pertanyaan penelitian yang

diajukan yaitu “Adakah perbedaan dari modal usaha, omzet penjualan, dan laba dari usaha mikro antara sebelum dan setelah memperoleh kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang?”

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbedaan modal usaha, omzet penjualan, dan laba dari usaha mikro antara sebelum dan setelah memperoleh kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh bantuan modal dan kredit yang diberikan.
2. Bagi Pengembangan Ilmu, hasil penelitian diharapkan dapat mengungkapkan pengaruh bantuan kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang bagi usaha mikro dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah daerah maupun instansi pendukung dalam menentukan arah dan kebijakan pengembangan usaha mikro di Kota Semarang.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang digunakan untuk mendukung penulis agar didapat gambaran yang jelas berkaitan dengan objek yang diteliti oleh penulis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian, deskripsi bantuan modal dan kredit dari Dinas KUMKM, profil responden, uji validitas dan uji reliabilitas, dan analisis data.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Usaha Mikro**

###### **2.1.1.1 Definisi Usaha Mikro**

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, definisi usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha mikro yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut yaitu:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Terdapat beberapa pengertian usaha mikro yang diberikan oleh beberapa lembaga, antara lain (Lembaga Penelitian SMERU, 2003):

#### **1. BPS**

Industri kerajinan rumah tangga yaitu perusahaan/usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1-4 orang, sedangkan industri kecil mempekerjakan 5-19 orang.

2. Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Industri-Dagang Mikro adalah industri-perdagangan yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang.

3. Departemen Keuangan

Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000 per tahun, sedangkan usaha kecil memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1 milyar per tahun.

4. Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Usaha mikro dan usaha kecil adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp200 juta dan atau mempunyai omzet/nilai output atau hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak-banyaknya Rp1 milyar dan usaha tersebut berdiri sendiri.

5. Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Pengusaha mikro adalah pemilik atau pelaku kegiatan usaha skala mikro di semua sektor ekonomi dengan kekayaan di luar tanah dan bangunan maksimum Rp25 juta.

6. ADB

Usaha mikro adalah usaha-usaha non-pertanian yang mempekerjakan kurang dari 10 orang termasuk pemilik usaha dan anggota keluarga.

#### 7. USAID

Usaha mikro adalah kegiatan bisnis yang mempekerjakan maksimal 10 orang pegawai termasuk anggota keluarga yang tidak dibayar. Kadangkala hanya melibatkan 1 orang, yaitu pemilik yang sekaligus menjadi pekerja. Kepemilikan aset dan pendapatannya terbatas.

#### 8. Bank Dunia

Usaha mikro merupakan usaha gabungan (*partnership*) atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang, termasuk di dalamnya usaha yang hanya dikerjakan oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemilik (*self-employed*). Usaha mikro sering merupakan usaha tingkat survival (usaha untuk mempertahankan hidup – *survival level activities*), yang kebutuhan keuangannya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman berskala kecil.

#### 9. ILO

Usaha mikro di negara berkembang mempunyai karakteristik, antara lain usaha dengan maksimal 10 orang pekerja, berskala kecil, menggunakan teknologi sederhana, aset minim, kemampuan manajerial rendah, dan tidak membayar pajak.

##### **2.1.1.2 Tujuan Usaha Mikro**

Tujuan usaha mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

### **2.1.1.3 Peranan Usaha Mikro**

Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dari pada yang terjadi di perusahaan besar (Sutrisno dan Sri, 2006).

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari (Kementerian Koperasi dan UKM, 2005):

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain: jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja; memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau ([www.smeccda.com](http://www.smeccda.com))

#### **2.1.1.4 Karakteristik Usaha Mikro**

Penelitian yang dilakukan LM-FEUI (Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) pada tahun 1994 menemukan karakteristik usaha kecil (mikro) di Indonesia sebagai berikut (Ahmad, n.d):

1. Hampir setengah perusahaan kecil hanya menggunakan kapasitas terpasang 60% atau kurang. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam perencanaan dan ketidakmampuan memperbesar pasar, dan lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan usaha kecil-kecilan.
2. Masalah utama yang dihadapi berbeda menurut tahap pengembangan usaha. Pada masa pengembangan (sebelum investasi) terdapat dua masalah yaitu, permodalan dan kemudahan berusaha (lokasi dan perijinan). Pada tahap selanjutnya sektor usaha kecil menghadapi kendala permodalan dan pengadaan bahan baku. Selain hal itu juga karena kurangnya keterampilan teknis dan administrasi.
3. Tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah berupa permodalan, pemasaran dan pengadaan bahan baku relatif masih tinggi.

4. Hampir 60% masih menggunakan teknologi tradisional.
5. Hampir 70% usaha kecil melakukan pemasaran langsung terhadap konsumen.
6. Sebagian besar pengusaha kecil dalam memperoleh bantuan perbankan merasa rumit dan dokumen yang harus disiapkan sukar dipenuhi.

#### **2.1.1.5 Tantangan dan Permasalahan Usaha Mikro**

Sebagaimana diketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan usahanya, UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain: manajemen, permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi dan pungutan, kemitraan. Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi UMKM, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi (Sri, n.d).

Menurut Dwiwinarno (2008 dalam Haryadi, 2010), ada beberapa faktor penghambat berkembangnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) antara lain kurangnya modal dan kemampuan manajerial yang rendah. Meskipun permintaan atas usaha mereka meningkat karena terkendala dana maka sering kali tidak bisa untuk memenuhi permintaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan informasi tentang tata cara mendapatkan dana dan keterbatasan kemampuan dalam membuat usulan untuk mendapatkan dana. Kebanyakan usaha skala kecil dalam menjalankan usaha tanpa adanya perencanaan, pengendalian maupun juga evaluasi kegiatan usaha.

Menurut Andang (2007), permasalahan UMKM dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (*basic problems*), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, sumber daya manusia (SDM), pengembangan produk dan akses pemasaran;
2. Permasalahan lanjutan (*advanced problems*), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor;
3. Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan.

Dengan pemahaman atas permasalahan di atas, akan dapat ditengarai berbagai problem dalam UMKM dalam tingkatan yang berbeda, sehingga solusi dan penanganannya pun seharusnya berbeda pula.

Menurut I Gusti (2011), tantangan yang dihadapi UMKM dan Koperasi, antara lain :

### 1. Teknologi

Penelusuran studi mengatakan bahwa komoditi yang dihasilkan pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah & Koperasi masih mempergunakan teknologi relatif rendah. Sementara negara maju lainnya pengembangannya berorientasi kepada teknologi maju. Berangkat dari situasi tersebut daya saing produknya di daerah relatif kalah bersaing di banding produk - produk dari negara-negara yang sudah berorientasi pada teknologi maju. Kendala penggunaan teknologi terbesar adalah biayanya yang cukup besar (mahal). Sering terjadi peluang pasar meningkat tetapi tak mampu memanfaatkannya karena tidak tersedianya teknologi yang memungkinkan peningkatan produktivitas.

### 2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Selama ini sebagian besar tenaga kerja yang bergerak dalam usaha mikro, kecil dan menengah & koperasi bukan merupakan tenaga kerja yang profesional, yang mampu mengelola usaha dengan baik.

### 3. Manajemen

Manajemen Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah & Koperasi merupakan salah satu faktor daya saing yang sangat penting. Banyak perusahaan yang punya teknologi, sumber daya manusia dengan skill yang memadai dan modal yang cukup, namun kinerja masih belum memenuhi harapan.



#### 4. Permodalan

Perkembangan permodalan para pengusaha mikro, kecil dan menengah hingga kini masih relatif lambat. Dan karenanya masih sering memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Modal adalah bagian yang tak terpisahkan dalam usaha pengembangan suatu bisnis, karena itu akses modal baik yang berwujud kredit, barang produksi merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah & Koperasi. Kalangan perbankan masih sering menilai para pengusaha mikro, kecil dan menengah & koperasi belum *Bankable*.

#### 5. Organisasi dan kelembagaan

Masih banyak terjadi bahwa perusahaan-perusahaan yang termasuk UMKM & Koperasi belum menunjukkan kejelasan prinsip-prinsip organisasi seperti kejelasan tujuan, kejelasan misi, kejelasan aktivitas, kejelasan rentang kendali. Adalah kenyataan pada umumnya para Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah & Koperasi sering menggunakan tipe organisasi yang sangat sederhana yang akibatnya berpengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan daya saing.

Hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut (Joko dan Sri, 2006):

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak *up to date*. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja usaha mikro.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat
3. Modal terbatas
4. Pengalaman manajerial perusahaan terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan penekanan biaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi.
6. Kemampuan pemasaran, negosiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas.
7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah, karena keterbatasan sistem administrasi.

Menurut Tulus (2002), beberapa permasalahan yang sering dihadapi UKM, khususnya industri kecil (IK) dan industri rumah tangga (IRT) antara lain:

1. Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

2. Keterbatasan finansial

UKM, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial: mobilisasi modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat

diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi.

### 3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *enterpreunership*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar.

### 4. Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan bahan baku yang terbatas serta harga bahan baku yang tinggi.

### 5. Keterbatasan teknologi

Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor di antaranya, keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan

SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi.

Dalam hasil survei BPS terhadap IK dan IRT menunjukkan bahwa masalah yang paling sering disebut adalah keterbatasan modal dan kesulitan dalam pemasaran. Sedangkan keterbatasan SDM dan teknologi modern ternyata bukan merupakan masalah yang serius bagi banyak pengusaha di IK dan IRT (Tulus, 2002).

#### **2.1.1.6 Kelompok Pelaku Usaha Mikro (KPUM)**

Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), merupakan fakta semangat jiwa kewirausahaan sejati di kalangan rakyat yang bisa menjadi perintis pembaharuan. Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis (Mariah, 2008).

Mengembangkan kelompok usaha ini secara riil strategis, setidaknya dilihat beberapa alasan yaitu, pertama, mereka telah mempunyai kegiatan ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga lebih mudah dan pasti; kedua, apabila kelompok ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berpindah menjadi sektor usaha kecil; ketiga, secara efektif mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri maupun orang lain (Mariah, 2008).

Berlandaskan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Koperasi dan UMKM membuat program bagi usaha mikro yaitu pembentukan kelompok pelaku

usaha mikro (KPUM) bagi para pelaku usaha mikro (PUM) di Kota Semarang. KPUM merupakan kelompok usaha yang berada di masyarakat dalam bentuk usaha mikro. Adanya program ini sebagai bentuk inovasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk mengembangkan usaha mikro di Kota Semarang.

Selain itu, dalam rangka mendukung upaya penanganan kemiskinan di kota Semarang dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro (PUM), maka diberikan bantuan peralatan usaha yang pengadaan dan penyalurannya dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 518.3/245 tentang Penetapan Kelompok Pelaku Usaha Mikro (KPUM) yang Mendapatkan Bantuan Peralatan Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro (PUM) Tahun 2011.

Keberadaan Kelompok-Kelompok Pelaku Usaha Mikro (KPUM) di masyarakat selama ini sangat besar manfaatnya bagi anggota, khususnya dalam rangka membantu mengembangkan kegiatan usaha. KPUM juga menjadi sarana alternatif yang positif dalam mendapatkan mitra usaha, bantuan modal usaha dan bantuan alat produksi sehingga kegiatan usaha anggota KPUM menjadi lebih terarah, dapat saling bersinergi, kuat, kokoh dan mandiri.

Seiring dengan makin banyaknya pelaku usaha mikro yang tergabung dalam KPUM dan membutuhkan dukungan pemerintahan guna pengembangan usahanya, sangat wajar bila para PUM (Pelaku Usaha Mikro) dan KPUM berharap mendapat bantuan dari pemerintah. Termasuk bantuan modal usaha

dalam bentuk dana maupun alat produksi untuk kegiatan pengembangan usaha mikro.

Agar kegiatan usaha mikro dapat lebih terkoordinasi dalam upaya pengembangan dan dalam pencarian modal usaha, maka pengkoordinasian PUM melalui KPUM akan sangat membantu pemerintah dan pihak PUM dalam mewujudkan adanya bantuan yang benar-benar tersalur secara efektif dan efisien sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat sekarang ini banyak PUM yang tergabung dalam KPUM dapat berkembang cukup baik dan membutuhkan dukungan bantuan modal usaha, diperlukan sekali adanya dukungan bantuan modal usaha dari berbagai pihak terkait. Termasuk dari pemerintah melalui dinas instansi terkaitnya, seperti halnya melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dengan program bantuan modal usaha bagi masyarakat PUM di Kota Semarang.

### **2.1.2 Modal**

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha atau perusahaan membutuhkan dana atau biaya untuk dapat beroperasi. Hal ini sebenarnya menjadi persoalan yang dihadapi hampir semua pengusaha, karena untuk memulai usaha dibutuhkan pengeluaran sejumlah uang sebagai modal awal. Pengeluaran tersebut untuk membeli bahan baku dan penolong, alat-alat dan fasilitas produksi serta pengeluaran operasional lainnya. Melalui barang-barang yang dibeli tersebut perusahaan dapat menghasilkan sejumlah output yang kemudian dapat dijualnya untuk mendapat sejumlah uang pengembalian modal dan keuntungan. Bagian keuntungan ini sebagian digunakan untuk memperbesar modal agar menghasilkan

uang sebagai keuntungan dalam jumlah yang lebih besar lagi, dan seterusnya begitu sampai pengusaha mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan atau target (Achmad, 2009).

Tulus (2002) menjelaskan bahwa modal adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar. Sedangkan Neti (2009) menyebutkan bahwa dalam memulai suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor penting disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa tidak berjalan apabila tidak tersedia modal. Artinya, bahwa suatu usaha tidak akan pernah ada atau tidak dapat berjalan tanpa adanya modal. Hal ini menggambarkan bahwa modal menjadi faktor utama dan penentu dari suatu kegiatan usaha. Karenanya setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha, maka langkah utama yang dilakukannya adalah memikirkan dan mencari modal untuk usahanya.

Menurut Prawirosentono (2002 dalam Neti, 2009) modal merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang dan dinyatakan dalam nilai uang. Modal dalam bentuk uang pada suatu usaha mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan usaha, yakni: (1) sebagian dibelikan tanah dan bangunan; (2) sebagian dibelikan persediaan bahan; (3) sebagian dibelikan mesin dan peralatan; dan (4) sebagian lagi disimpan dalam bentuk uang tunai.

Selain sebagai bagian terpenting di dalam proses produksi, modal juga merupakan faktor utama dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam

pengembangan perusahaan. Hal ini dicapai melalui peningkatan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan atau laba bagi pengusaha (Achmad, 2009).

Dengan tersedianya modal maka usaha akan berjalan lancar sehingga akan mengembangkan modal itu sendiri melalui suatu proses kegiatan usaha. Modal yang digunakan dapat merupakan modal sendiri seluruhnya atau merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan modal pinjaman. Kumpulan berbagai sumber modal akan membentuk suatu kekuatan modal yang ditanamkan guna menjalankan usaha. Modal yang dimiliki tersebut jika dikelola secara optimal maka akan meningkatkan volume penjualan (Riyanto, 1985 dalam Achmad, 2009).

Terdapat pula adanya penggunaan istilah modal untuk mengacu kepada arti yang lebih khusus, misalnya modal sosial dan modal manusia. Istilah yang pertama mengacu kepada jenis modal yang tersedia bagi kepentingan umum, seperti rumah sakit, gedung sekolah, jalan raya dan sebagainya, sedangkan istilah yang kedua mengacu kepada faktor manusia produktif yang mencakup faktor kecakapan dan keterampilan manusia. Menyelenggarakan pendidikan misalnya, disebut sebagai suatu investasi dalam modal manusia (www.ut.ac.id, 2011:1-4).

#### **2.1.2.1 Definisi Modal**

Istilah modal berbeda artinya dalam percakapan sehari-hari dan dalam ilmu ekonomi. Modal (*capital*) sering ditafsirkan sebagai uang. Terutama apabila mempersoalkan pembelian peralatan, mesin-mesin, atau fasilitas-fasilitas produktif lain. Adalah lebih tepat untuk menyatakan uang yang digunakan untuk melaksanakan pembelian tersebut sebagai modal finansial (*financial capital*). Seorang ahli ekonomi akan menyatakan pembelian demikian sebagai investasi.



Para ekonom menggunakan istilah modal untuk semua alat bantu yang digunakan dalam bidang produksi (Winardi, 1995).

Adakalanya modal dinamakan barang-barang investasi, dan modal demikian terdiri dari:

- a. Mesin-mesin
- b. Peralatan
- c. Bangunan-bangunan
- d. Fasilitas-fasilitas transpor dan distribusi
- e. Persediaan (inventaris) barang-barang setengah jadi

Ada suatu ciri pokok barang-barang modal yaitu bahwa mereka digunakan untuk memproduksi barang-barang lain.

Menurut Prof. Dr. H.M.H.A. van der Valk (Winardi, 1995), modal dalam arti luas adalah bagian daripada arus benda-benda dan jasa-jasa yang langsung, yang ditujukan guna penyediaan benda-benda material dan immaterial yang berkemampuan untuk memberikan prestasi-prestasi ekonomi pada masa yang akan datang. Modal dalam arti sempit adalah alat-alat produksi yang telah diproduksi. Dalam arti yang lebih luas modal berarti pula setiap penambahan dalam pengetahuan yang menyebabkan prestasi ekonomi pada masa yang akan datang bertambah.

Bagian terbesar dari aktivitas ekonomi ditujukan ke arah masa yang akan datang. Sesuai dengan itu maka bagian terbesar dari konsumsi sekarang, merupakan konsekuensi usaha-usaha masa lampau. Pada masyarakat yang progresif, maka sebagian dari usaha produktif yang berlangsung ditujukan ke arah

pembentukan modal baru; hal mana berarti bahwa sebagian dari konsumsi sekarang dikurbankan, guna memperbesar produksi pada masa yang akan datang (Winardi, 1995).

### **2.1.2.2 Konsep Modal**

Dalam ilmu ekonomi, istilah *capital* (modal) merupakan konsep yang pengertiannya berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut. Secara historis konsep modal juga mengalami perubahan atau perkembangan. Istilah “modal” yang biasa dipergunakan pada abad ke-16 dan abad ke-17 menunjukkan pengertian kepada dua hal. Pertama, modal dalam pengertian persediaan uang yang digunakan untuk membeli barang yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Kedua, modal dengan maksud untuk menggambarkan persediaan yang berupa barang-barang. Oleh sebab itu maka istilah “modal” digunakan untuk kedua pengertian yaitu konsep keuangan dan konsep barang (Komaruddin, 1991).

John Stuart Mill dalam *Principle of Political Economy* (dalam Komaruddin, 1991) menggunakan istilah “modal” dalam pengertian: (1) barang-barang fisik yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang lainnya, dan (2) sejumlah dana yang tersedia untuk menyewa tenaga kerja. Pada akhir abad ke-19, modal dalam pengertian barang-barang fisik yang digunakan dalam proses produksi ditinjau sebagai salah satu dari keempat faktor dasar dalam produksi. Yang lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau keusahawanan.

Sekarang, “modal” sebagai suatu konsep ekonomi dipergunakan dalam konteks yang berbeda-beda. Mubyarto (1989) memberikan definisi modal sebagai

sumber-sumber ekonomi di luar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia. Kadang-kadang modal dilihat dalam arti uang atau dalam arti keseluruhan nilai sumber-sumber ekonomi non-manusiawi termasuk tanah. Definisi modal yang lain yaitu merupakan barang atau uang, yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang baru. Dalam artian yang lebih luas, dan dalam tradisi pandangan ekonomi non-Marxian pada umumnya, modal mengacu kepada *asset* yang dimiliki seseorang sebagai kekayaan yang tidak segera dikonsumsi melainkan disimpan (*saving*) atau dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa baru (investasi). Dengan demikian, modal dapat berwujud barang dan uang (www.ut.ac.id, 2011:1-4).

Akan tetapi, tidak setiap jumlah uang dapat disebut modal. Sejumlah uang itu menjadi modal apabila uang tersebut ditanam atau diinvestasikan untuk menjamin adanya suatu kembalian. Dalam arti ini modal juga mengacu kepada investasi itu sendiri yang dapat berupa alat-alat finansial seperti deposito, stok barang, ataupun surat saham yang mencerminkan hak atas sarana produksi, atau dapat pula berupa sarana produksi fisik. Kembalian itu dapat berupa pembayaran bunga, ataupun klaim atas suatu keuntungan (www.ut.ac.id, 2011:1-4).

Adam Smith dalam *The Wealth of Nation* (dalam www.ut.ac.id, 2011:1-4) menggunakan istilah *capital* dan *circulating capital*. Perbedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu (misal satu tahun). Jika suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya dikonsumsi sebagian sehingga hanya sebagian (kecil) nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut *fixed capital* dalam bentuk bangunan pabrik,

mesin-mesin, peralatan transportasi, kemudahan distribusi, dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk memproduksi barang/jasa baru. Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, maka disebut *circulating capital* dalam bentuk barang jadi ataupun setengah jadi yang berada dalam proses untuk diolah menjadi barang jadi.

### **2.1.3 Kredit**

#### **2.1.3.1 Definisi Kredit**

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa “kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

#### **2.1.3.2 Fungsi dan Manfaat Kredit**

Kredit mempunyai fungsi bagi dunia usaha termasuk juga usaha kecil yaitu sebagai sumber permodalan untuk menjaga kelangsungan atau meningkatkan usahanya. Sedangkan bagi lembaga keuangan termasuk juga bank kredit berfungsi menyalurkan dana masyarakat (deposito, tabungan, giro) dalam bentuk kredit kepada dunia usaha ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Manfaat kredit bagi debitur yaitu memberi keuntungan usaha dengan adanya tambahan modal dan berkembangnya usaha. Sedangkan manfaat bagi lembaga keuangan yaitu memberi keuntungan dari selisih bunga pemberian kredit atau jasa lainnya ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

### 2.1.3.3 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008 dalam Billy, 2010) :

1. Kepercayaan.

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar - benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan.

Yaitu adanya kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu.

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Risiko.

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya / macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi

tanggung bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

#### 5. Balas Jasa.

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### 2.1.3.4 Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaan oleh debitur antara lain ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)):

1. Untuk pembelian barang modal atau perluasan usaha
2. Untuk menambah modal kerja usaha
3. Untuk keperluan konsumsi
4. Kredit untuk pertanian, perdagangan, industri, konstruksi, atau profesi

Menurut Dahlan (1999), kredit ini dapat digolongkan ke dalam enam bentuk yaitu:

1. Penggolongan kredit berdasarkan jangka waktu (*maturity*), antara lain:
  - a. Kredit jangka pendek (*short-term loan*)
  - b. Kredit jangka menengah (*medium-term loan*)
  - c. Kredit jangka panjang (*long-em loan*)
2. Penggolongan kredit berdasarkan barang jaminan (*collateral*), antara lain:
  - a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)
  - b. Kredit dengan jaminan (*unsecured loan*)

3. Kredit berdasarkan segmen usaha, seperti otomotif, farmasi, tekstil, makanan, konstruksi dan sebagainya.
4. Penggolongan kredit berdasarkan tujuannya, antara lain:
  - a. Kredit komersil (*commercial loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan.
  - b. Kredit konsumtif (*consumer loan*), yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif.
  - c. Kredit produktif (*productive loan*), yaitu kredit yang diberikan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi.
5. Penggolongan kredit menurut penggunaannya, antara lain:
  - a. Kredit modal kerja (*working capital credit*), yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur.
  - b. Kredit investasi (*Investment credit*), yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan untuk digunakan melakukan investasi dengan membeli barang-barang modal.
6. Kredit non kas (*non cash loan*), yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang hanya boleh ditarik apabila suatu transaksi yang telah diperjanjikan telah direalisasikan atau efektif.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul, Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang, Fitra Ananda, 2011	Modal Usaha, Omzet Penjualan, dan Keuntungan	Uji Pangkat Tanda Wilcoxon	Ada beda variabel modal, omzet penjualan, dan keuntungan sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT At Taqwa Halmahera Kota Semarang.
2.	Analisis Bantuan Kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terhadap Perkembangan UMK Binaan KUB Rukun Mina Barokah di Kecamatan Juwana, Priyo Harsono, 2010	Modal Usaha, Tenaga Kerja, Jumlah Pembeli, Total Penjualan, dan Keuntungan	Uji Statistik Pangkat Tanda Wilcoxon	Ada peningkatan secara signifikan pada variabel modal usaha, tenaga kerja, jumlah pembeli, total penjualan, dan keuntungan sesudah mendapatkan bantuan kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
3.	Analisis Usaha Mikro Monel yang Memperoleh Kredit dari Dinas UMKM Kabupaten Jepara (Studi Kasus: Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara), Indah Yuliana Putri, 2010	Modal, Produksi, Omzet Penjualan, Tenaga Kerja dan Keuntungan	Uji Statistik Pangkat Tanda Wilcoxon	Ada beda atau terjadi peningkatan variabel modal produksi, omzet penjualan, tenaga kerja dan keuntungan sesudah kredit Dinas UMKM Kabupaten Jepara.
4.	Pendampingan Perempuan Pedagang Pasar Tradisional Melalui Kredit Mikro (Studi Kasus Koperasi Bagor Semarang), Piet Budiono, 2005	Biaya Konsumsi, Biaya Pendidikan, Pendapatan, Keuntungan, Jumlah Simpanan,	Uji Normalitas, Uji Pangkat Tanda Wilcoxon, dan Uji Chi-Square	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan bermakna secara statistik meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan



		Kemandirian		keuntungan usaha, dan meningkatkan kemandirian perempuan pedagang pasar tradisional.
--	--	-------------	--	--

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini.

Penelitian ini lebih ditujukan untuk menganalisis bantuan kredit dari Dinas KUMKM kepada kelompok pelaku usaha mikro dengan melihat perkembangan dari modal usaha, omzet penjualan, dan laba usaha mikro antara sebelum dan setelah memperoleh kredit.

Adapun kerangka berpikir disusun sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

1. Ada perbedaan modal usaha mikro setelah memperoleh kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
2. Ada perbedaan omzet penjualan usaha mikro setelah memperoleh kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
3. Ada perbedaan laba usaha mikro setelah memperoleh kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu modal usaha, omzet penjualan, dan laba dari usaha mikro. Penelitian ini akan menganalisis perbedaan ketiga variabel di atas antara sebelum dan setelah memperoleh kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Bantuan modal dan kredit dari Dinas KUMKM diberikan pada pertengahan tahun 2010 sehingga kondisi sebelum pemberian bantuan modal dan kredit yaitu sebelum pertengahan tahun 2010, dan kondisi setelah pemberian bantuan yaitu setelah pertengahan tahun 2010 sampai awal penelitian pada bulan April 2012.

##### **3.1.2 Definisi Operasional Variabel**

Untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti, maka akan diterangkan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Bantuan modal adalah bantuan dalam bentuk barang hibah yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
2. Bantuan kredit adalah sejumlah uang pinjaman yang diberikan kepada usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

3. Modal Usaha adalah kemampuan finansial untuk memulai usaha dan ketika masih menjalankan usaha untuk memproduksi barang dan jasa yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).
4. Omzet Penjualan adalah jumlah total hasil produksi yang dapat dijual dalam sebulan yang dihasilkan oleh pengusaha mikro. Adapun omzet penjualan ini dapat dihitung dengan mengalikan total jumlah yang terjual dengan harga yang dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).
5. Laba adalah jumlah keuntungan yang diperoleh pengusaha dalam sebulan yang didapat dari total pendapatan dikurangi biaya operasional. Laba ini dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp).

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh anggota kelompok pelaku usaha mikro (KPUM) di Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah yang mendapat bantuan modal barang dan kredit berjumlah 50 orang yang dibagi menjadi lima kelompok sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kelompok Pelaku Usaha Mikro (KPUM) di Kelurahan Pekunden**  
**Tahun 2011**

No.	Nama KPUM	Anggota (orang)
1.	KPUM Pekunden 1	10
2.	KPUM Pekunden 2	10
3.	KPUM Pekunden 3	10
4.	KPUM Pekunden 4	10
5.	KPUM Pekunden 5	10
<b>Total</b>		<b>50</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang (diolah)

Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan menetapkan secara sengaja lokasi penelitian dan responden yang diteliti. Sesuai dengan judul penelitian, fokus penelitian adalah kelompok pelaku usaha mikro yang mendapat bantuan modal dan kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Responden yang dijadikan sampel adalah anggota kelompok pelaku usaha mikro yang berjumlah 50 orang responden.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer diperoleh dari data lapangan yang diteliti terutama yang berkaitan dengan informasi modal usaha, omzet penjualan, dan laba dari usaha mikro di Kelurahan Pekunden Kecamatan Semarang Tengah yang mendapat bantuan modal dan kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
2. Data sekunder, yang merupakan data pelengkap diperoleh dari kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan instansi lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara/peneliti dengan responden atau pihak-pihak yang berwenang.

2. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.
3. Dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mengkaji setiap data yang terdapat pada usaha mikro yang diteliti dan pada sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

### **3.5 Metode Analisis**

Dalam penelitian ini digunakan uji validitas dan uji reliabilitas, analisis deskriptif, dan uji pangkat tanda Wilcoxon. Sebelum data dianalisis, kuesioner diuji terlebih dulu dengan Uji Validitas dan Reliabilitas. Setelah itu data dianalisis dengan Uji Statistik Pangkat Tanda Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan antara sebelum dan setelah memperoleh kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang yang meliputi perkembangan usaha mikro seperti modal usaha, omzet penjualan dan laba. Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS versi 17. Untuk analisis bantuan modal hanya digunakan analisis deskriptif, sedangkan analisis bantuan kredit digunakan analisis deskriptif dan uji pangkat tanda Wilcoxon.

#### **3.5.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur (Imam, 2007). Suatu alat pengukur dikatakan sah atau valid, jika alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu (S. Nasution, 2009).

Validitas data dapat diukur dengan melihat muatan faktor dan *Pearson correlation*. Kuesioner dikatakan valid jika memiliki muatan faktor lebih besar dari 0,32 (muatan faktor  $> 0,32$ ) dan *Pearson correlation* kurang dari 0,05 (*Pearson correlation*  $< 0,05$ ).

### **3.5.2 Uji Reliabilitas**

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu alat pengukur dikatakan *reliable* bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi alat yang *reliable* secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama (S. Nasution, 2009). Cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner adalah dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* dimana suatu kuesioner dikatakan reliabel jika *cronbach alpha*  $> 0,60$  (Imam, 2007).

### **3.5.3 Uji Pangkat Tanda Wilcoxon**

Uji pangkat bertanda Wilcoxon digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak. Dalam penelitian ini akan dilihat perubahan pada variabel yang diamati pada awal

periode maupun pada akhir periode. Adapun variabel-variabel yang diamati dan diuji adalah modal usaha, omzet penjualan dan laba usaha mikro. Setelah uji pangkat tanda Wilcoxon dilakukan akan muncul nilai  $Z$  dan nilai probabilitas ( $p$ ). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- $H_0$  = Tidak ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan setelah memperoleh kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
- $H_1$  = Ada beda variabel yang diuji antara sebelum dan setelah memperoleh kredit dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

Jika probabilitas ( $p$ )  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, jika probabilitas ( $p$ )  $< 0,05$  maka  $H_1$  diterima. Pengambilan keputusan dengan membandingkan  $Z_{hitung}$  dan  $Z_{tabel}$ . Jika  $Z_{hitung} > Z_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, jika  $Z_{hitung} < Z_{tabel}$  maka  $H_1$  diterima (Singih, 2004).

Dengan tingkat signifikansi  $\alpha=5\%$  dengan uji dua sisi maka nilai kritis yang bersesuaian dari tabel adalah  $Z_{0,025} = 1,96$  dan  $-Z_{0,025} = -1,96$ . Daerah kritis adalah  $Z_{hitung} > 1,96$  atau  $Z_{hitung} < -1,96$ .